

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Disusun Oleh:

NAMA : DWI PURWANTO
NOMOR POKOK : 1863002147
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.A.P.)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama :Dwi Purwanto
NPM :1863002147
Program Studi :Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi :Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Judul Tesis (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT
ACCOUNTING SYSTEM IN DRAFTING FINANCIAL STATEMENTS OF THE
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. R Luki Karunia, MA.)

Pembimbing II



(Yogi Soewarno, MA., Ph.D.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dwi Purwanto
NPM : 1863002147
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Judul Tesis (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT
ACCOUNTING SYSTEM IN DRAFTING FINANCIAL STATEMENTS OF THE
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Juni 2021
Pukul : 09.30

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Pembimbing 1 : Dr. R. Luki Karunia, MA.

Pembimbing 2 : Yogi Suwarno, MA., Ph.D.

Anggota : Dr. Asropi, M.Si.

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Purwanto
NPM : 1863001247
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “ IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya, Apabila dikemudian hari penulis tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta. 18 Juni 2021

Penulis,



Dwi Purwanto

ABSTRAK

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Dwi Purwanto, R Luki Karunia, Yogi Suwarno

damarsuryo.dp@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Reformasi keuangan negara melahirkan beberapa peraturan salah satunya yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi instrumen penting dalam penyusunan laporan keuangan, dalam praktik penyusunan laporan keuangan pada Kementerian Kelautan Perikanan diharapkan mampu memberikan informasi bagi pengguna, memberikan transparansi, menjadi perwujudan akuntabilitas serta menjadi pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) melalui penyusunan laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif. Atas dasar itu penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi apakah Implementasi SAP dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat penyusunan laporan keuangan yang berkualitas yaitu memenuhi prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penggalan data, observasi dan wawancara dengan pihak yang kompeten dan terlibat langsung dalam proses penyusunan, kesimpulan dalam penelitian ini dapat disampaikan bahwa implementasi SAP pada penyusunan laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 telah memenuhi prinsip relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, namun belum dapat memenuhi prinsip andal dikarenakan masih tingginya nilai temuan dalam pemeriksaan BPK RI. Sebagai upaya dalam menjamin penyajian laporan keuangan dapat memenuhi prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami sebagai saran dan rekomendasi dalam penelitian ini yaitu melakukan peningkatan kemampuan dan pemahaman akuntansi bagi penyusun laporan keuangan melalui pendidikan pelatihan yang berkesinambungan. Melakukan penyusunan SOP persediaan khususnya pada persediaan yang masih menjadi temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Menyelenggarakan bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan serta Melakukan pengembangan sistem Informasi yang mendukung dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan keuangan, Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dipahami.

ABSTRACT

Implementation Of The Government Accounting System In Drafting Financial Statements Of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries

Dwi Purwanto, R Luki Karunia, Yogi Suwarno

damarsuryo.dp@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

The reform of state finances gave birth to several regulations including Government Accounting Standards (SAP) which became an important instrument in the preparation of financial reports, in the practice of preparing financial reports at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries it is expected to be able to provide information for users, provide transparency, become a manifestation of accountability and become management considerations in take decisions to realize good governance through the preparation of quality financial reports that meet qualitative characteristics. On that basis, this research is intended to explore whether the implementation of SAP in the preparation of financial statements has met the qualitative characteristics which are prerequisites for the preparation of quality financial statements that meet the principles of relevance, reliability, comparison and understanding. This study uses qualitative methods through data mining, observation and interviews with competent parties who are directly involved in the preparation process, the conclusions in this study can be conveyed that the implementation of SAP in the preparation of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries financial statements in 2017 has met the relevant principles, can be compared , is understandable, but has not been able to meet the principle of reliability due to the high value of findings in the examination of BPK RI. As an effort to ensure that the presentation of financial statements can meet the principles of relevance, reliability, comparability, and can be understood as suggestions and recommendations in this study, namely increasing the ability and understanding of accounting for financial statement preparers through continuous education and training. Prepare inventory SOPs, especially on inventory that is still a finding in the examination of financial statements. Organizing technical guidance on the preparation of financial statements as well as developing information systems that support the preparation of notes to financial statements.

Keywords: Financial statements, Relevant, Reliable, comparable, understood.

DAFTAR ISI

a. Lembar Judul	i
b. Lembar Persetujuan	ii
c. Lembar Pengesahan	iii
d. Pernyataan Originalitas	iv
e. Abstrak	v
f. Abstract	vi
g. Daftar Isi	vii
h. Daftar Tabel	ix
i. Daftar Gambar	x
j. Daftar Lampiran	xi
Bab I Permasalahan Penelitian	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Permasalah	10
c. Tujuan Penelitian	10
e. Manfaat Penelitian	11
Bab II Kerangka Teori	
a. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci	13
b. Konsep Berpikir	51
c. Penelitian Sebelumnya	54
d. Pertanyaan Penelitian	61
Bab III Metodologi Penelitian	
a. Metode Penelitian	62
b. Teknik Pengumpulan Data	63
c. Prosedur Pengolahan Data	68
e. Langkah langkah Penelitian	70
Bab IV Hasil Penelitian	
a. Gambaran Umum	72
b. Hasil Penelitian	82

Bab V Simpulan dan Saran

a. Simpulan 117

b. Saran 118

3. Daftar Pustaka 119

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup Penulis.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Tabel

1.1	Realisasi Penyerapan Anggaran Periode 2015-2019	2
1.2	Sebaran data petugas penyusunan laporan keuangan 2020	4
1.3	Proses Bisnis Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4	Perkembangan Opini LK KKP 2015-2019	6
2.1	Matrik Penelitian Terdahulu	55
2.2	Matrik Jurnal Internasional	58
3.1	Daftar Key Informan dalam wawancara	66
4.1	Laporan Realisasi Anggaran LK KKP 2017	95
4.2	Neraca LK KKP 2017	100
4.3	Laporan Operasional LK KKP 2017	104
4.4	Laporan Perubahan Ekuitas LK KKP 2017	107
4.5	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi Pemeriksaan BPK 2015-2019	110
4.6	Status Penyelesaian Tindak Lanjut yang sesuai dan belum sesuai atas temuan rekomendasi Pemeriksaan BPK RI 2015-2019	115

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Gambar

1.1	Grafik Penyerapan Anggaran 2015-2019	3
2.1	Konsep Berpikir diadopsi berdasarkan PP nomor 71 Tahun 2010	52
3.1	Langkah langkah penelitian	71
4.1	Struktur Organisasi KKP	76
4.2	Grafik Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI 2015-2019	111
4.3	Grafik Status Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Rekomendasi BPK Periode 2015-2019	116



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Lampiran

1. Daftar Riwayat Hidup Penulis	123
2. Transkrip Wawancara	124
3. Daftar Key Informan	146
4. Daftar Operator Penyusun LK Eselon I Lingkup KKP	154
5. Surat Permohonan Ijin Penelitian Politeknik STIA LAN Jakarta	155
6. Surat Keterangan Melakukan Penelitian	156



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Disusun Oleh:

NAMA : DWI PURWANTO
NOMOR POKOK : 1863002147
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma baru dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu yang diterbitkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 yang memberikan perubahan baru dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan tujuan terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, laporan ini berperan menjamin tersedianya Informasi yang berguna dan berkaitan dan tentang posisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan pada suatu entitas organisasi pelaporan dalam suatu periode pelaporan, selain daripada itu laporan keuangan digunakan pula untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektifitas suatu entitas pelaporan, juga membantu menilai ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta bermanfaat dalam memberikan Informasi bagi pihak pengguna laporan keuangan, juga sebagai alat dalam hal peningkatan akuntabilitas serta keterbukaan dalam rangka pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara, pun berfungsi untuk memberikan Informasi bagi pengelola entitas dalam pengambilan keputusan sebagai usaha dalam perwujudan yang baik dalam tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu Kementerian/Lembaga di Republik Indonesia tentunya berkewajiban melaksanakan ketentuan untuk terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Atas dasar itu peneliti memandang perlu melakukan penelitian terkait dengan Laporan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada penelitian terhadap laporan keuangan ini peneliti menitik beratkan pada ruang lingkup karakteristik kualitatif yang menjadi prasyarat yang dikehendaki untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas melalui prinsip atau ukuran normatif yang perlu diwujudkan sebagai Informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan yaitu memenuhi prinsip prinsip relevan, andal dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Permasalahan pertama yang peneliti temukan yaitu bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, dari periode 2015 sampai dengan 2019 realisasi penyerapan belanja KKP mengalami fluktuasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Realisasi Penyerapan Anggaran Periode 2015-2019

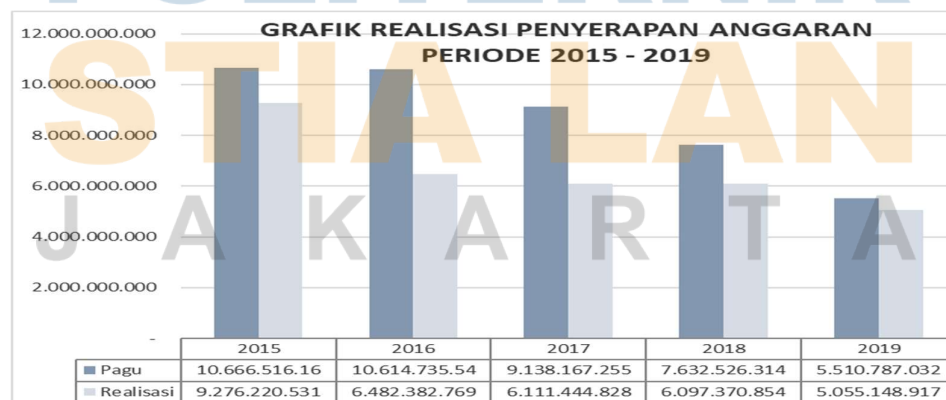
Tahun	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)	
2015	10.666.516.169.000	9.276.220.531.795	87,02%	1.385.489.847.192
2016	10.614.735.547.000	6.482.382.769.935	61,07%	4.132.352.777.065
2017	9.138.167.255.000	6.111.444.828.030	66,88%	3.026.722.426.970
2018	7.632.526.314.000	6.097.370.854.297	79,89%	1.535.155.459.703
2019	5.510.787.032.000	5.055.148.917.815	91,73%	455.638.114.185

Sumber: LK KPP tahun 2015-2019

Pada tahun 2015 kinerja penyerapan anggaran mencapai 87.02% dari pagu jika dibandingkan tahun 2016 dengan pagu yang tidak terpaut jauh dan kinerja penyerapan anggaran hanya mencapai 61.07% terdapat perbedaan serapan antara tahun 2015 dan 2016 sejumlah Rp2.793.837.761.860 atau turun 25.95%, begitupun pada tahun 2017 meskipun pagu anggaran telah diturunkan kinerja penyerapan anggaran hanya mencapai 66.88%. secara prosentase realisasi mengalami kenaikan 5.81% namun pada nominal masih mengalami penurunan sebesar Rp370.937.941.905. begitu pula pada tahun 2018 dan 2019 meskipun secara prosentase mengalami perubahan yang berangsur naik dari 79.89% menjadi 91.73% atau naik 11.85% namun pada kenyataannya kinerja penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar Rp1.042.221.936.482.

Penyerapan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat Peneliti paparkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1: Grafik Penyerapan Anggaran Periode 2015-2019



Sumber: Omspan Tahun 2015-2019

Dalam penyusunan laporan, suatu organisasi membutuhkan sumber daya yang mempunyai kemampuan/ ketrampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi atau wewenang untuk tercapainya suatu tujuan dalam penyusunan laporan keuangan, serta mendukung terhadap keterandalan pelaporan keuangan, dari 9 unit Eselon 1 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat peneliti paparkan sebaran sumber daya manusia sebagai petugas penyusunan laporan keuangan sebagai mana berikut ini:

Tabel 1.2 : Sebaran data petugas penyusunan laporan keuangan 2020

Jumlah Unit Eselon 1	Jumlah Penyusun LK	Jurusan		Pendidikan			
		Akuntansi	Non Akuntansi	SMA	D.3	S.1	S.2
9 Unit E.1	18 orang	5 orang	13 orang	2 orang	1 orang	13 orang	1 orang

Sumber: Biro Keu KKP 2020

Sejak 2015 dimana pada Pemerintah Pusat mulai diterapkan sistem akuntansi instansi (SAI) yang berbasis akrual atau SAIBA dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang digunakan disetiap Kementerian Negara/Lembaga. Dengan sendirinya setiap entitas pelaporan dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyesuaikan baik dalam segi sumber daya penyusun laporan keuangan maupun kompetensi atau pengetahuan keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Berkaitan dengan proses bisnis/siklus akuntansi dengan basis akrual atau SAIBA dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- Tahap/Proses Input: Operator Persediaan, BMN dan Saiba melakukan Input Saldo awal yang merupakan saldo Akhir TAYL, Transaksi Akruai, dan DIPA.
- Tahap Proses: melakukan proses akuntansi atas Belanja (SP2D) Pendapatan (SSBP), jurnal/entries data atas persediaan dan BMN dan posting data.
- Tahap Output: atas proses rekonsiliasi data dari ketiga aplikasi diperoleh output berupa LRA, Neraca, LPE, LO dan Catatan atas LK.

Tabel 1.3 : Proses bisnis penyusunan laporan

Tahap	Sumber/Proses/Data	Sumber Daya
1. Input	- DIPA, Revisi - SP2D - Penerimaan Negara - Barang Persediaan - BMN	- Operator Persediaan - Operator BMN - Operator SAIBA
2. Proses	- Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal/Entries - Posting	- Aplikasi Persediaan - Aplikasi SIMAK BMN - Aplikasi SAIBA
3. Output	- LO - Neraca - LRA - LPE - CALK	- Aplikasi SAIBA - Penyusun LK (Operator dan Penelaah)

Sumber: PMK 104/PMK.05/2017

Pelaporan Keuangan pada suatu instansi Pemerintah, baik Instansi pusat atau Instansi daerah wajib dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa keuangan, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, pada Instansi Pusat tentunya dilakukan oleh BPK RI, dan Instansi Daerah tentunya oleh BPK Perwakilan, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD tahun 1945 yang memberi amanat tentang pemeriksaan

terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. dengan tujuan untuk mengetahui hal hal apa saja yang perlu diperhatikan perhatian oleh Dewan Perwakilan atau Lembaga legislatif. Sedangkan dari sisi pemerintahan untuk menjamin bahwa kegiatan yang didanai keuangan negara/daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan terpenuhinya sasaran maka dilakukanlah suatu pemeriksaan.

Merujuk pada Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan *Disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). dan ini merupakan kali keduanya yang terjadi secara berturut turut dari tahun 2016 dan 2017 Laporan Keuangan KKP mendapatkan opini yang sama sebagaimana dalam tabel 1.4.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2015 sampai tahun 2019 mengalami perubahan yang dinamis dalam pencapaian sebuah Opini, berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari LKPP tahun 2017, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.4: Perkembangan Opini LK KKP

BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
		2015	2016	2017	2018	2019
032	Kelautan dan Perikanan	WTP	TMP	TMP	W.TP	WT.P

Sumber: BPK_RI_LHP atas LKPP 2019

WTP: Wajar Tanpa Pengecualian(*Unqualified Opinion*)

WTP DPP: Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian(*Qualified Opinion*)

TMP : Tidak Memberikan Pendapat(*Disclaimer*)

TW : Tidak Wajar(*Adverse Opinion*)

Berdasarkan Resume Laporan Audit atas Pengendalian Intern pada Kementerian Kelautan Perikanan pada Tahun 2017, terdapat kondisi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Operasionalnya ditemukan oleh BPK, kelemahan pokok SPI atas LK KKP 2017 yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK diantaranya:

1. Tidak diyakini kewajarannya atas realisasi belanja barang pada Sekretariat BKIPM;
2. Tidak diyakini kewajarannya terhadap realisasi pembayaran honorarium stauan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal pada Satker Direktorat Penangan Pelanggaran Ditjen PSDKP;
3. Realisasi pada belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kapal Pengawas Perikanan tidak didukung dengan dokumen yang memadai;
4. Tidak meyakini kewajarannya terhadap Penyajian saldo persediaan pada 28 satker tahun 2017;
5. tidak diyakini kewajarannya terhadap penyajian saldo persediaan tahun 2017. pada DJPB;
6. Persediaan tahun 2017 pada Direktorat KAPI tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya;

7. Pengelolaan serta penatausahaan aset tetap juga aset lainnya belum memadai;
8. Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) pada Ditjen Perikanan Tangkap berupa sebagian tanah dan bangunan tidak sesuai ketentuan;
9. Tidak diyakini kewajarannya atas penyajian Saldo utang pada pihak ketiga, pada Direktorat KAPI Ditjen PT tahun 2017.

(sumber LHP LK KKP, LHP atas SPI nomor 14B/LHP/XVII/05/2018).

Sedangkan dalam pengujian terhadap kepatuhan pada peraturan perundang-undangan pada LK KKP pada 2017, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dengan pokok temuan antara lain:

1. Tidak meyakini kewajaran atas pembayaran pembangunan kapal yang diperuntukan sebagai bantuan kepada masyarakat tahun 2017 pada Direktorat KAPI Ditjen PT;
 2. Pekerjaan pengadaan barang percontohan *piloting* budidaya ikan *Offshore* (Kerambah Jaring Apung/KJA) pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan;
 3. Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa dan kekurangan penerimaan Negara atas denda keterlambatan;
 4. Kerjasama antara KKP dengan SMA KSO terhadap pemanfaatan BMN di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pulau Nipah Kota Batam tidak memadai;
- (sumber: LHP LK KKP, LHP Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan_nomor_14C/LHP/XVII/05/2018).

Atas dasar permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengangkat Tesis dengan Judul “**Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan**”.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

B. Rumusan Permasalahan

Atas uraian yang telah disajikan pada bab I huruf A yaitu latar belakang permasalahan, peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif. Dimana karakteristik kualitatif merupakan prasyarat yang dikehendaki dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas melalui prinsip atau ukuran normatif yang perlu diwujudkan sebagai Informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan. antara lain:

1. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi prinsip Relevan?
2. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi prinsip Andal?
3. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi prinsip dapat dibandingkan?
4. Menggali Informasi apakah dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi prinsip dapat dipahami/ Informatif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian dengan tema “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan” antara lain:

- 1) Menggali Informasi apakah dalam pelaporan keuangan penyusunannya telah memenuhi prinsip/ norma Relevan?
- 2) Menggali Informasi apakah pelaporan keuangan dalam penyusunannya telah memenuhi prinsip/ norma Andal?
- 3) Menggali Informasi apakah pelaporan keuangan dalam penyusunannya telah memenuhi prinsip/ norma dapat dibandingkan?
- 4) Menggali Informasi apakah pelaporan keuangan dalam penyusunannya telah memenuhi prinsip/ norma Informatif/dapat dipahami?

2. Manfaat Penelitian

I. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi serta masukan bagi penyusun laporan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam praktik mengimplementasikan teori karakteristik laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat mengetahui kelemahan/kendala dalam penerapannya serta pemecahannya.

Memberikan masukan bagi pihak manajemen khususnya mengenai kualitas laporan keuangan instansi, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam praktik penyusunan laporan.

II. Manfaat Akademis

Manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu, dapat Peneliti sampaikan bahwa dengan adanya sebuah penelitian maka secara otomatis dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri juga bagi pihak lain yang membutuhkan. dan yang tidak kalah pentingnya yaitu seni komunikasi dalam meneliti, yaitu bagaimana berhubungan dengan orang lain yang kita butuhkan Informasi dan pengalamannya, ilmu, saran serta masukannya, dan dapat dijadikan dalam literatur literatur penelitian pada masa yang akan datang.

